



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan, diperlukan sebuah *Road Map* Reformasi Birokrasi dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang melengkapi, mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022-2026;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022-2026 perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2023-2024;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023-2024.*

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Reformasi Birokrasi adalah sebuah instrumen alat dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat.
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
9. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/atau jangka pendek.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. panduan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tahapan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi;
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. arahan mengenai penajaman yang ingin dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi; dan
- b. meningkatkan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan sehingga mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

BAB II KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari Reformasi Birokrasi general dan tematik.
- (2) Reformasi Birokrasi general sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan agenda Pembangunan Nasional.
- (3) Reformasi Birokrasi tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah menetapkan rencana dan target Reformasi Birokrasi setiap tahun, yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Perangkat Daerah wajib menyusun dan melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diuangkan dalam rencana aksi reformasi birokrasi Perangkat Daerah.

**BAB III
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan berjalan dengan baik.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar laporan yang disampaikan kepada Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 11 Agustus 2023
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 11 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 39

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Daerah. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional umumnya, Pembangunan Daerah khususnya.

Pada akhir periode *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya reformasi birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Situbondo dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, perlu peningkatan mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional umumnya dan pembangunan Kabupaten Situbondo khususnya, serta pencapaian daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan reformasi birokrasi perlu peningkatan agar bisa dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi sudah dilakukan secara kolaboratif oleh masing-masing instansi pemerintah sehingga perlu peningkatan fokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga untuk peningkatan reformasi birokrasi perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional umumnya dan reformasi birokrasi daerah khususnya yang sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi reformasi birokrasi;
2. sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi reformasi birokrasi untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan reformasi birokrasi diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan reformasi birokrasi;
3. pengelolaan reformasi birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis reformasi birokrasi dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi;
4. kolaborasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang cenderung silo mentality (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran reformasi birokrasi yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator reformasi birokrasi yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

B. Tujuan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi

Tujuan Penajaman *Road Map* RB Tahun 2023–2024, yaitu:

1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB
Penajaman *Road Map* RB 2023-2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua periode *Road Map* RB 2023-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di Pemerintah Daerah. *Road Map* RB 2023-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama *Road Map* pada *Grand Design*. Melalui penajaman *Road Map* RB 2023-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.
2. Mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan
Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.
3. Mendapatkan *Road Map* RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan

Penajaman *Road Map* RB 2023–2024 dilakukan untuk mengurangi silo mentality (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* RB 2023–2024, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

C. Isu Strategis

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* RB.

1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

a. Birokrasi yang Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Peran yang silo mentality menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan RB.

b. Transformasi Digital yang Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, komitmen pimpinan di pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan peningkatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

c. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

d. Peningkatan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan

Peningkatan Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih adanya temuan penyimpangan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

e. Peningkatan Implementasi Budaya Birokrasi BerAKHLAK

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Sosialisasi dan peningkatan internalisasi nilai BerAKHLAK di seluruh Perangkat Daerah, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK dapat merata pada ASN di seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan Penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Pada tahun 2020 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo meningkat tajam di angka 12,22 sebagai imbas dari pandemi COVID 19. Angka presentase kemiskinan Situbondo ini

lebih tinggi dari angka penduduk miskin Provinsi Jawa timur yang berada di angka 11,09 dan lebih tinggi dari angka penduduk miskin nasional yang berada pada angka 9,78. Hal tersebut menunjukkan hal yang negatif karena dengan bertambahnya jumlah persentase penduduk miskin menandakan bahwa semakin banyak rumah tangga yang mengalami masalah dalam perekonomian di masa pandemi COVID 19 di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Namun pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Situbondo berhasil menurunkan persentase kemiskinan menjadi 11,78.

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Peningkatan kualitas tata kelola lintas instansi sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

b. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Kemudahan izin berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Situbondo ditingkatkan.

c. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptif, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Reformasi birokrasi tematik diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah untuk mencegah *stunting*.

d. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

D. Dasar Pelaksanaan

Dalam penyusunan road map reformasi birokrasi Kabupaten Situbondo perlu memperhatikan beberapa peraturan antara lain, sebagai berikut:

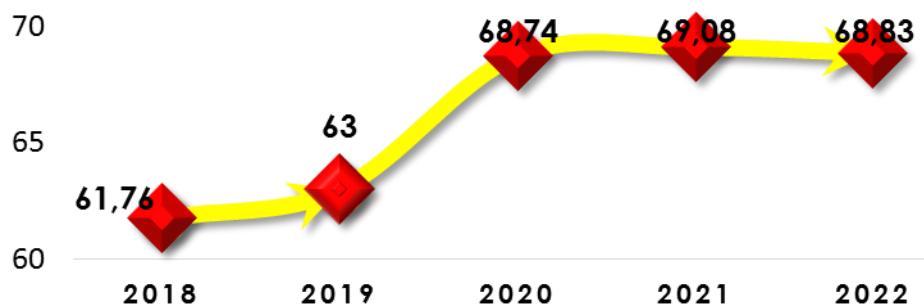
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI KABUPATEN SITUBONDO

Pelaksanaan RB di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mengalami peningkatan. Capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Gambar 2.1. disajikan grafik nilai Indeks RB selama lima tahun terakhir. Secara umum, nilai Indeks RB Kabupaten Situbondo selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dengan capaian pada tahun 2022 sudah dalam kategori baik.



Gambar 2.1 Indeks RB Tahun 2018-2022

Beberapa capaian dari pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Situbondo sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 272 jabatan administrasi pada 44 Perangkat Daerah yang telah disederhanakan dan dialihkan ke Jabatan Fungsional, setelah melalui proses pengusulan dan pemberian pertimbangan tertulis untuk penyederhanaan birokrasi.

2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Terdapat 58 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Sistem Tata Kelola melalui elektronik, yang diwujudkan dengan penilaian tingkat kematangan SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat “sangat baik” (3,19 dari skala 0-5).

3. Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan capaian pembangunan daerah, pelaksanaan RB juga diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, penguatan usaha mikro

kecil menengah (UMKM) dan pariwisata, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya.

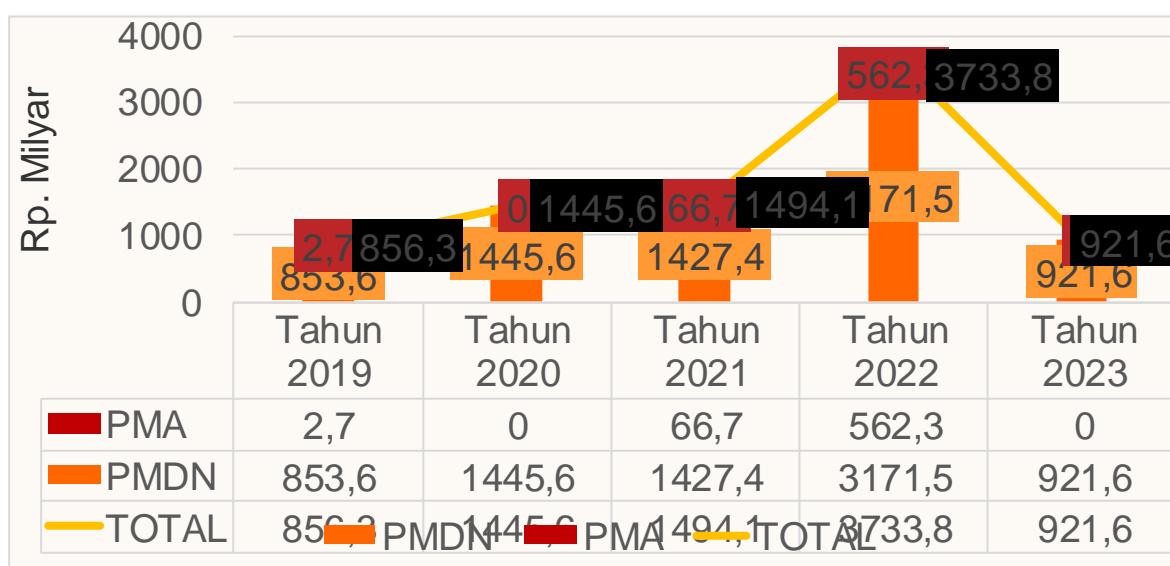
Berdasarkan data dari BPS, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo dalam lima tahun terakhir terus menurun sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Angka Kemiskinan di Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir

Mengacu pada gambar di atas, angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan. Meskipun pada tahun 2020 & 2021 terjadi peningkatan angka kemiskinan yang dikarenakan adanya Pandemi Covid-19, namun pada tahun 2022 Kabupaten Situbondo sudah mulai bangkit lagi sehingga angka kemiskinan mulai turun lagi.

Angka investasi dalam aspek PMDN dan PMA mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun (2019 s.d. triwulan I 2023), namun masih perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.



Gambar 2.3 Realisasi Investasi PMA-PMDN 2019-triwulan I 2023

Melihat data kemiskinan dan investasi di atas, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan RB diharapkan dapat mengoptimalkan hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi di Kabupaten Situbondo.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SITUBONDO

A. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan reformasi birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama reformasi birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi reformasi birokrasi pada pembangunan nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

B. Sasaran Strategi Reformasi Birokrasi

Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis reformasi birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

C. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2024 setelah penajaman, kegiatan reformasi birokrasi

tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

D. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan RB adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map RB 2023-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

E. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Kegiatan utama perlu didukung dengan anggaran Pemerintah Daerah. Sehingga perlu menetapkan prioritas kegiatan utama untuk menetapkan kegiatan utama yang perlu segera dilakukan.

Tabel 3.1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

No.	SASARAN (<i>Immediate Outcome</i>)	KEGIATAN UTAMA	MANDAT RB GENERAL UTAMA	TINGKAT KEPARAHAN	WAKTU MENDESAK	SKALA PRIORITAS (TOTAL SKOR)
SS.1 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, kolaboratif, dan Akuntabel						
S.1	Terimplementasikannya kebijakan penyederhanaan birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	1	1	12
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	10	7	27
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	2	3	15
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	2	2	14

	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					
S.5	Terbangunnya pelayanan publik digital (Digital Services)	Pelaksanaan pelayanan publik digital	10	8	10	28
S.6	Meningkatnya kualitas pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	6	5	21
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	3	3	16
		Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	10	4	6	20
		Penguatan upaya pencegahan korupsi	10	3	5	18
S.7	Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik	10	3	3	16
		Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan	10	3	1	14
S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan arsip digital	10	9	10	29
		Pelaksanaan data statistik sektoral	10	5	5	20
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah	10	4	4	18
		Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	10	3	3	16

SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

S.1	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	Penataan jabatan fungsional	10	8	10	28
S.2	Terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien	Penguatan manajemen talenta ASN	10	10	10	30
S.3	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN	-				
S.4	Terwujudnya rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	-				

S.5	Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN	-				
S.6	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja	Pengelolaan kinerja pegawai ASN	10	5	5	20
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan sistem merit	10	8	10	28
		Pelaksanaan Core Values ASN	10	5	5	20
		Pelaksanaan pelayanan publik prima	10	5	4	19

F. Target Kinerja Reformasi Birokrasi sampai dengan 2024

Kinerja Pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Target Kinerja Tujuan RB

No	Tujuan RB 2023-2024	Indikator Tujuan	Baseline 2022	Target 2024
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	68,83	71,05% - 71,55%
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan:		
		a. Angka Kemiskinan	11.78%	11,39%- 11,04%
		b. Pertumbuhan Investasi	1,56 T	3,73 T
		c. Pengendalian Tingkat Inflasi	N/A	N/A
		d. Penggunaan Produk Dalam Negeri	63,24%	75%

Tabel 3.3 Target Kinerja Sasaran Strategis RB

No	Sasaran Strategis RB 2023-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2022	Target 2024
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	3,19	3,30
		Capaian Akuntabilitas Kinerja - Nilai SAKIP	81,41	84,05 – 84,55
		Capaian Akuntabilitas Keuangan - Opini BPK	WTP	WTP

2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	N/A	
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	N/A	
		Nilai Survei Penilaian Integritas	73,52	78
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	82,71	81,01 - 82,00

Tabel 3.4 Target Kinerja Kegiatan Utama RB

No.	Kegiatan Utama	Indikator	Baselin e	Target		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2022	2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transfor masi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	N/A	100%	100%	BAGIAN ORGANISASI	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	N/A	50%	100%	BAGIAN ORGANISASI	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,19	3,20	3,30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	Naik	Naik		Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Baik	Baik	BAPPEDA	Seluruh PD
		Nilai SAKIP	81,41	83,80 - 84,04	84,05 - 84,55	BAPPEDA	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP	N/A	N/A	N/A	DPMPTSP	DPMPTSP
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI - Jumlah PD yang mendapat Predikat WBK	N/A	1	3	INSPEKTORAT	Seluruh PD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3,292	3,4	3,5	INSPEKTORAT	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	73,52	75	78	INSPEKTORAT	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	N/A	N/A	BAGIAN HUKUM	BAGIAN HUKUM
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	N/A	BAGIAN HUKUM	BAGIAN HUKUM

12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip - Indeks Pengawasan Kearsipan	52,32	55,09	60,34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	100%	100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	68,8	70	72	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BKAD	Seluruh PD
16		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	100%	100%	100%	INSPEKTORAT	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	N/A	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta	N/A	1	1	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN	85%	100%	100%	BKPSDM	BKPSDM
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	212,5	260	300	BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhhlak*	61,7	Naik	Naik	BAGIAN ORGANISASI	Seluruh PD
21		Employeer Branding*	N/A	N/A	N/A	BAGIAN ORGANISASI	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82,71	80,01 - 81,00	81,01 - 82,00	BAGIAN ORGANISASI	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	3,53	3,54	3,55	BAGIAN ORGANISASI	Seluruh PD

G. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Kabupaten Situbondo. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 RB Tematik di Kabupaten Situbondo difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Digitalisasi Pemerintahan;
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Tabel 3.5 Penetapan Tema RB Tematik

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline	Target	
			2022	2023	2024
Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	11.78	12,10 -11,84	11,83 - 11,57
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	3,73 T	1,53 T	1,56 T
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	30,9%	24%	14%
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	63,24%	70%	73%
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	N/A	N/A	N/A

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Kebijakan Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2023-2024

Penetapan strategi pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan Perangkat Daerah pengampu dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Menetapkan Road Map RB

Menetapkan Road Map RB adalah tahapan untuk menentukan arah pelaksanaan RB. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam Road Map RB antara lain:

- a. Isu strategis terkait tata kelola pemerintah;
- b. Capaian RB;
- c. Tujuan dan sasaran strategis RB;
- d. Strategi dan program RB baik general maupun tematik; dan
- e. Manajemen/pengelolaan RB.

2. Menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan RB

Menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map RB instansi. Rencana aksi minimal berisi:

- a. Rincian kegiatan;
- b. Indikator output dari rincian kegiatan;
- c. Target;
- d. Waktu pelaksanaan; serta
- e. Penanggungjawab.

3. Mengelola Pelaksanaan Rencana Aksi

Mengelola pelaksanaan rencana aksi yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditentukan, maka Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Internal yang menangani hal tersebut.

4. Monitoring dan evaluasi RB

Monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk:

- a. memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB;
- b. menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;
- c. menilai kualitas pengelolaan RB internal.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, yang dilakukan secara internal oleh evaluator internal.

5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya

Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini pemerintah daerah telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

Tabel 4. 1 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General

No.	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana						
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana					
SS.1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel																			
S.1 Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi																			
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	Penguatan implementasi penyederhanaan birokrasi dengan baik	Jumlah PD	Jumlah hasil pemetaan ABK pada unit kerja			22	22	44	Rp -	Bagian Organisasi	Seluruh PD					
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Tingkat Implemenataasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	60%	Tersedianya kebijakan sistem kerja baru dan fleksibel bagi pegawai ASN	Jumlah	Jumlah kebijakan sistem kerja baru dan fleksibel bekerja pegawai			1		1	Rp -	Bagian Organisasi	Seluruh PD					
				Pemungutan implementasi sistem kerja baru dan fleksibel bekerja pegawai	Jumlah	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan penyesuaian mekanisme kerja			11	11	22	Rp -	Bagian Organisasi	Seluruh PD					
					Jumlah	Jumlah proses bisnis yang disesuaikan		3	3	4	10	Rp -	Bagian Organisasi	Seluruh PD					

No.	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
				Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja baru dan fleksibel pegawai ASN	Kali	Jumlah monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja baru			11	11	22	Rp -	Bagian Organisasi	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE, Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE		Melakukan peningkatan kompetensi SDM TIK	Kali	Jumlah pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan SDM TIK Pemerintah Daerah		1		1	2	Rp. 17,200,000	Diskominfo	Diskominfo
				Melakukan pengembangan integrasi sistem	%	Presentase PD yang telah terintegrasi		50%		50%	100%	Rp. 51,550,000	Diskominfo	Diskominfo
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Penguatan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang terintegrasi	Jumlah PD	Jumlah PD yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Baik	45	45	47	47	47	-	BAPPEDA	Seluruh PD
		Nilai SAKIP		Monitoring dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Jumlah PD	Jumlah PD yang dimonitoring dan dievaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	47	47	47	47	47	Rp. 376,865,324	Bagian Organisasi	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP		Penguatan Pelaksanaan Pelayanan Publik Konvensional	Jumlah	Jumlah UPP yang melaksanakan pelayanan publik dengan baik	27	-	-	-	27	-	DPMPTSP	Seluruh Unit Pelayanan Publik

No.	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
				Pengadaan Sarana dan Prasarana MPP Konvensional	Jumlah	Jumlah Pengadaan Bangunan Gedung Sekretariat MPP Konvensional			1		1	Rp 500,000,000	DPMPTSP	Pihak Ketiga
					Jumlah	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin dan Meubeler MPP Konvensional (1 Paket)			1		1	Rp 845,927,060	DPMPTSP	Pihak Ketiga
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI, Jumlah PD yang mendapat Predikat WBK	2	Pemenuhan LKE dan dokumen penunjang lainnya	Jumlah	Jumlah PD yang menyelesaikan LKE dan penunjang lainnya dalam pembangunan Zona Integritas	0	2	0	0	2	Rp -	Inspektorat	Unit Kerja Zona Integritas
			2	Penilaian Mandiri Pembangunan ZI	Jumlah	Jumlah PD yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK	0	2	0	0	2	Rp 10,550,000	Inspektorat	Unit Kerja Zona Integritas
			5	Monev Pembangunan ZI	Kali	Pelaksanaan monev terkait dengan pembangunan Zona Integritas	0	3	1	1	5	Rp 6,400,000	Inspektorat	Unit Kerja Zona Integritas
7	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	44	Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko OPD	Jumlah OPD	Jumlah hasil pemetaan risiko unit kerja/OPD	44	0	0	0	44	Rp 8,960,000	Inspektorat	Seluruh PD

No.	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
			2	Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian Risiko	Kali	Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan	0	0	1	1	2	Rp -	Inspektorat	Seluruh PD
			1	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri SPIP OPD	kali	Jumlah Bimbingan Teknis yang Dilakukan	0	1	0	0	1	Rp 7,200,000	Inspektorat	Seluruh PD
			1	Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP OPD	kali	Jumlah Pendampingan ke OPD	0	1	0	0	1	Rp 22,400,000	Inspektorat	Seluruh PD
			1	Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP Pemda	laporan	Laporan Penilaian Mandiri SPIP Pemerintah Daerah	0	1	0	0	1	Rp -	Inspektorat	Inspektorat
			1	Pelaksanaan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP Pemda	laporan	Laporan PK SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo	0	0	1	0	1	Rp -	Inspektorat	Inspektorat
			2	monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi PK SPIP Pemda dan OPD	kali dan laporan	Laporan tindak lanjut rekomendasi PK SPIP Pemda dan OPD	0	0	1	1	2	Rp -	Inspektorat	Inspektorat
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	%	Presentase kecepatan respon / tanggapan pertama pengaduan	25%	25%	25%	25%	100%	Rp 27,101,000	Kominfo	Seluruh PD

No.	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	1	Penyusunan Rencana Aksi Tinjut SPI Tahun 2022	Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Aksi	0	1	0	0	1	Rp 1,600,000	Inspektorat	Inspektorat
				Penyelesaian Tindak Lanjur SPI Tahun sebelumnya	Jumlah	Jumlah laporan tindak lanjut hasil SPI Tahun 2022	0	0	1	1	2	Rp -	Inspektorat	Inspektorat
				Sosialisasi SPI	Jumlah	Jumlah Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi	0	1	1	0	2	Rp 5,000,000	Inspektorat	Inspektorat
				Sosialisasi Tindak pidana korupsi	Jumlah	Jumlah Sosialisasi tindak korupsi baik tatap muka, banner atau sosmed	0	0	1	2	3	Rp 9,000,000	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	100%	Program Pembentukan Peraturan Daerah	%	Persentase keputusan yang diterbitkan dan dipublikasikan di JDIH	25	25	25	25	100	Rp 433,377,220	Bagian Hukum	Bagian Hukum
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang - undangan	Indeks Reformasi Hukum	100%	Pengharmonisasi Rancangan Produk Hukum dengan instansi yang berwenang	%	Produk Hukum yang dipublikasikan di JDIH	25	25	25	25	100	Rp 127,000,000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
				Melaksanakan evaluasi produk hukum	%	Evaluasi produk hukum	25	25	25	25	100		Bagian Hukum	Bagian Hukum
				Melakukan integrasi JDIH	%	Melakukan integrasi JDIH	25	25	25	25	100		Bagian Hukum	Bagian Hukum
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Pengawasan Kearsipan	100%	Implementasi sistem kearsipan digital (e-arsip)	Unit/Satuan Kerja	Jumlah PD yang dimonitor implementasi sistem arsip digital	-	-	-	5	5	Rp 100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh PD

No.	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
				Pengelolaan arsip sesuai aturan	Unit/Satuan Kerja	Jumlah PD yang menjadi obyek Pengawasan Kearsipan Internal	-	-	5	-	5	Rp 69,819,300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh PD
				Digitalisasi arsip	Lembar	Jumlah arsip yang dialihkan mediakan	-	100	100		200	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Pembinaan Pengelolaan Kearsipan	Unit/Satuan Kerja	Jumlah pengelola arsip yang dibina	-	-	-	60	60	Rp 98,444,300		
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektroal	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	100%	Melakukan pemutakhiran data pada portal satu data	%	Persentase pemutakhiran data pada portal satu data		25%	25%	50%	100%	Rp 21,373,200	Diskominfo	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	100%	Monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Prosentase	Jumlah PD yang telah melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan baik	100%				100%	Rp 556,639,320	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD
					Prosentase	Prosentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-tendering berdasarkan data SiRUP			50%	50%	100%		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD

No.	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
					Prosentase	Prosentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-phurchasing berdasarkan data SiRUP			50%	50%	100%		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD
					Prosentase	Prosentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui non e-tendering dan non e-phurchasing berdasarkan data SiRUP			50%	50%	100%		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD
					Prosentase	Prosentase pengisian e-kontrak sampai dengan selesai			50%	50%	100%		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD
					Prosentase	Prosentase penilaian tingkat kematangan UKPBJ	25%	25%	25%	25%	100%		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD
				Penguatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Prosentase	Monitoring dan evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah PD	Jumlah PD yang dimonitoring dan dievaluasi implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD

No.	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah PD	Jumlah PD yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dengan baik	15%	15%	20%	25%	75%	Rp 909,139,184	BKAD	Seluruh PD
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah PD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 OPD	48 OPD	-	-	100%	Rp 258,923,500	BKAD	Seluruh PD
		Tidak Lanjut Rekomendasi BPK	100%	Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah disampaikan ke BPK	kali	Berapa kali dilakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK		1		1	2		Inspektorat	Seluruh PD
				Melakukan koordinasi dengan PD terkait hasil temuan BPK	kali	Berapa kali dilakukan Rapat Koordinasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK		1		1	2		Inspektorat	Seluruh PD
				Melakukan penagihan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	kali	Berapa kali dilakukan penagihan hasil penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK		1		1	2		Inspektorat	Seluruh PD

No.	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
	SS.2 : Budaya Birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang Profesional													
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Baik	Optimalisasi penyetaraan Jabatan Fungsional	%	Seluruh Eselon IV kecuali Kasubag Keuangan/Kasubag Umum dan Kepegawaian pada PD dan Eselon IV pada Kecamatan dan kelurahan telah disetarakan menjadi jabatan fungsional	100%				100%	Rp 75,000,000	BKPSDM	BKPSDM
				Pelaksanaan mekanisme kinerja jabatan fungsional	%	Seluruh ASN dalam jabatan fungsional penyetaraan telah melaksanakan kinerja sesuai PerMenpan 7 Tahun 2022	0				0%		BKPSDM	BKPSDM
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	Baik	Perencanaan untuk menyusun Tim Manajemen Talenta,	Dokumen	Tersusun SK Tim Manajemen Talenta			1		1	-	BKPSDM	BKPSDM

No.	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
				Penilaian ASN terkait kinerja, kompetensi, rekam jejak dan kelompok rencana sukses	Kali	Penilaian kinerja, kompetensi dan rekam jejak ASN			1		1	-	BKPSDM	BKPSDM
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	Baik	Pembangunan Aplikasi sesuai Permenpan 6 tahun 2022	Jumlah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1				1	Terintegrasi dengan SI-ASN	BKPSDM	BKPSDM
				Migrasi Data SKP sesuai Permenpan 6 tahun 2022	%	Persentase migrasi data SKP sesuai Permenpan 6 tahun 2022	95%				95%	0	BKPSDM	BKPSDM
				Sosialisasi e-SKP dan sesuai Permenpan 6 tahun 2022	%	Persentase jumlah PD yang mendapat sosialisasi e-SKP dan sesuai Permenpan 6 tahun 2022	20%	25%	25%	25%	95%	Rp 30,000,000	BKPSDM	BKPSDM
19	Penguat Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Sangat Baik	Menginput data penilaian mandiri (menambah, menghapus, mengubah data penilaian mandiri)	%	Persentase keterisian data penilaian mandiri	45%	45%			90%	Rp-	BKPSDM	BKPSDM

No.	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target					Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana
				Mengunggah bukti wajib dan pendukung penilaian mandiri pada setiap subaspek penilaian sistem merit	%	Persentase pemenuhan data pendukung penilaian mandiri	45%	45%			90%	Rp-	BKPSDM	BKPSDM
				Mengunggah Berita Acara Penilaian	%	Persentase berita acara penilaian yang diunggah					0%	Rp-	BKPSDM	BKPSDM
20	Pelaksanaan Core Value ASN	Indeks Berakhhlak	Baik	Sosialisasi Internalisasi ASN BerAKHLAK	Jumlah	Jumlah kegiatan sosialisasi ASN BerAKHLAK				1		Rp 23,134,676	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		Employer Branding	Baik	Pelaksanaan Survey Core Value ASN BerAKHLAK	Jumlah	Jumlah kegiatan Survei Core Value ASN BerAKHLAK yang dilaksanakan						Rp-	Bagian Organisasi	Seluruh PD
				Penyusunan Banner, Brosur, Buku Panduan, Layout Zoom, Video	Jumlah	Jumlah jenis media untuk pelaksanaan publikasi						Rp-	Bagian Organisasi	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	73	Monitoring Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	%	Persentase Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat				67		Rp 82,714,900	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

No.	Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan (2023)	Rencana Aksi	Output		Target				Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	Koordinator	Pelaksana
	Indeks Pelayanan Publik	3,6	Pemantauan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	%	Persentase Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dipantau Penyelenggaraan Pelayanan Publiknya				44		Rp-	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

B. Kebijakan dan Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023-2024

Tabel 4. 2 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penurunan Angka Kemiskinan

NO	SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARG ET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/S TAKEHOLDER UTAMA)	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA	
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
1.	KEMISKINAN	Kemiskinan Kabupaten Situbondo masih cukup tinggi	Menurunnya angka kemiskinan	Percentase Kemiskinan	11,52 - 11,40	Pembayaran premi JKN Masyarakat miskin yang dibayarkan Pemda	Orang	Jumlah Masyarakat yang premi JKNnya dibayarkan Pemda	39850	39850	39850	39850	39850 (Kepesertaan JKN yang Tiap Triwulan)	Terkait	Rp. 14,587,000		Dinas Kesehatan
						Pelayanan masyarakat tidak mampu dalam Program Sehati	Orang	Jumlah Penduduk yang terlayani Program Sehati	3282	3282	3282	3282	13128	Terkait	Rp. 20,000,000		Dinas Kesehatan
						Pembangunan Jamban	Jamban	Jumlah jamban yang terbangun	0	0	0	197	197	Terkait	Rp. 758,450,000		Dinas Kesehatan
						Pembangunan Fasilitas Kesehatan	Unit	Jumlah Unit Fasilitas Kesehatan yang Dibangun					1	Terkait	Rp. 650,000,000		Dinas Kesehatan
						Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	Unit	Jumlah Unit Fasilitas Kesehatan yang direhabilitasi dan dipelihara			3	3	6	Tidak terkait	Rp. 3,050,000		Dinas Kesehatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/S TAKEHOLDER UTAMA)	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA	
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di renovasi	100	100	150	150	500	Terkait	Rp. 13,255,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
						Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga	Jumlah Sub Sistem Pengolahan Setempat yang dibangun/disediakan	250	250	375	375	1250	Terkait	Rp. 4,652,500		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
						Pembangunan /Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	M ³ /Hari	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang dibangun/disediakan	2.688	2.688	4.032	13.44	Terkait	Rp. 5,742,720		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Saluran	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang dibangun	10	10	15	15	50	Terkait	Rp. 750,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Saluran	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang ditingkatkan	160	160	240	240	800	Terkait	Rp. 8,068,491		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
						Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM	Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina terhadap penyelenggaraan SPAM	2	2	3	3	10	Terkait	Rp. 140,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman

NO	SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/S TAKEHOLDER UTAMA)	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA		
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA	
							araan SPAM											
						Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit	Jumlah SPAM di Kawasan Perdesaan yang beroperasi dan dipelihara		1		1	2	Terkait	Rp. 100,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	
						Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang diperbaiki		1		1	2	Terkait	Rp. 100,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				1	1	Tidak terkait	Rp. 145,000,000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	
						Penyaluran Biaya Peserta Didik miskin dan putus sekolah Sekolah Dasar	siswa SD	Jumlah siswa SD yang disediakan biayanya			90		90	Terkait	Rp. 113,500,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Penyaluran biaya peserta didik miskin dan putus sekolah sekolah	siswa SMP	Jumlah siswa SMP yang disediakan biayanya			70		70	Terkait	Rp. 105,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/S TAKEHOLDER UTAMA)	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA		
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA	
						menengah pertama												
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	Jumlah unit Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun			2	2	4	Terkait	Rp. 420,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Rehabilitasi Ruang Kelas	Unit	Jumlah unit ruang kelas yang di rehabiliasi			1	1	2	Terkait	Rp. 200,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia				300	300	Terkait	Rp. 1,354,057,340		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Korban bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi				120	120	Terkait	Rp. 75,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamat				600	600	Terkait	Rp. 150,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

NO	SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/S TAKEHOLDER UTAMA)	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA	
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
							an dan Evakuasi Korban Bencana										
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	Jumlah orang yang di berikan bantuan sosial kesejakteraan	600	6000	740	7407	26807	Terkait	Rp. 6,788,576,016		Dinas Sosial
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Orang	Jumlah orang yang di berikan peningkatan kemampuan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga			25	25	50	Terkait	Rp. 150,000,000		Dinas Sosial
						Pemberian Alat Bantu	Orang	Jumlah orang yang di berikan bantuan pemberian alat bantu			9	9		Terkait	Rp. 29,898,445		Dinas Sosial
						Validitas data dalam Penanganan PMKS	Orang	Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam data penanganan PMKS	136				136	Terkait	Rp. 50,000,000		Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/S TAKEHOLDER UTAMA)	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA	
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
						Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi		60	80	90	230	Terkait	Rp. 1,395,000,000		Dinas Ketenagakerjaan
						Tersedianya Perluasan Kesempatan Kerja dan Lapangan Usaha	Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		50	70	80	200	Terkait	Rp. 1,390,872,500		Dinas Ketenagakerjaan
						Fasilitasi Pencari Kerja dan Pencari Tenaga Kerja	Orang	Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				60	60	Terkait	Rp. 100,000,000		Dinas Ketenagakerjaan
						Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Orang	Jumlah wirausaha yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya			30	30	60	Terkait	Rp. 100,000,000		Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
						Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan			30	30	60	Terkait	Rp. 180,000,000		Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/S TAKEHOLDER UTAMA)	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA	
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
							gan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif										
						Pelatihan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan	Orang	Jumlah nelayan yang mengikuti pelatihan Peningkata n ketersediaa n ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan	100	100	100	300	Terkait	Rp. 565,000,000		Dinas Peternakan dan Perikanan	
						Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kelompok pembudidaya ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mengikuti Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			5	5	Terkait	Rp. 120,000,000		Dinas Peternakan dan Perikanan	
						Peningkatan kapasitas nelayan kecil	Orang	Jumlah nelayan kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas		100	100	200	Terkait	Rp. 826,150,000		Dinas Peternakan dan Perikanan	

NO	SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/S TAKEHOLDER UTAMA)	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA	
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
							Nelayan Kecil										
						Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia		2	2	2	6	Terkait	Rp. 250,000,000		Dinas Peternakan dan Perikanan
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganelekragaman Konsumsi Pangan	Kelompok tani	Jumlah Kelompok tani dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganelekragaman Konsumsi Pangan				2	2	Tidak terkait	Rp. 393,718,800		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	Jumlah Unit Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2	3	3	3	11	Tidak terkait	Rp. 4,514,000,000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	Jumlah kelembagaan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	1	1	1	1	4	Tidak terkait	Rp. 491,625,000		DPMD

NO	SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/S TAKEHOLDER UTAMA)	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA	
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
							Kelurahan	Jumlah kelembagaan kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya	20	30	40	42	132	Tidak terkait			
						Validitas data masyarakat miskin	Laporan	Jumlah laporan data masyarakat miskin				1	1	Tidak terkait	116,400,000		BAPPEDA
						Peningkatan kemitraan usaha mikro dengan E-Commerce	Orang	Jumlah usaha mikro yang mengikuti sosialisasi Peningkatan kemitraan dengan E-Commerce		100	100	100	300	Tidak terkait	365,000,000		Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
						Peningkatan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Orang	Jumlah usaha mikro yang mengikuti pelatihan peningkatan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro				100	100	Tidak terkait			Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

NO	SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/S TAKEHOLDER UTAMA)	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA	
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
						Usaha mikro yang mendapatkan sosialisasi, pembinaan dan monev SHAT	Orang	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan sosialisasi, pembinaan dan monev SHAT		55	100	100	255	Tidak terkait			Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
						Melaksanakan Pengawasan dan koordinasi ketersediaan sembako	kali	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan koordinasi ketersediaan sembako	3	3	1	3	10	Terkait	347,654,000		Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
						Melaksanakan pasar murah	kali	Jumlah terlaksananya pasar murah	5	10	2	3	20	Terkait			Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
						Melaksanakan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	kali	Jumlah terlaksananya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	5	5	5	5	20	Tidak terkait			Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 4. 3 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi

No	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/STAKEHOLDER UTAMA)	Jumlah Anggaran	Unit Pelaksana/ Satuan Kerja Pelaksana	
						SASARAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
1	Belum tersajikannya data terkait dengan kewaspadaan dini	Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang disusun	1 Dokumen	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Masyarakat	Jumlah data yang disusun				1	1	Terkait langsung dengan masyarakat	50,000,000	Bakesbangpol	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2	Adanya perselisihan antara pekerja dengan perusahaan	Pekerja dan Perusahaan	Jumlah penyelesaian perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	25 kasus	Terlaksananya penyelesaian perselisihan yang diselesaikan dengan hubungan industrial	Pekerja dan Perusahaan	Jumlah penyelesaian perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	6	6	6	7	25	Terkait langsung dengan masyarakat	70,875,000	Dinas Ketenagakerjaan	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3	Kurangnya pemahaman terkait deteksi dini dan cegah dini pada masyarakat	Tokoh masyarakat dan aparat terkait	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis deteksi dini dan cegah dini bagi aparat terkait	30 Orang	Terlaksananya bimbingan teknis deteksi dini dan cegah dini bagi aparat terkait	Tokoh masyarakat dan aparat terkait	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis deteksi dini dan cegah dini bagi aparat terkait		30			30	Terkait langsung dengan masyarakat	20,000,000	Bakesbangpol	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
					Terlaksananya Sosialisasi terhadap masyarakat pelanggar Perda	Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi perda	1	0	1	0	2	Pertemuan tatap muka dan himbauan	38,475,700	Satpol PP Kab. Situbondo	Satpol PP Kab. Situbondo

No	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/STAKEHOLDER UTAMA)	Jumlah Anggaran	Unit Pelaksana/ Satuan Kerja Pelaksana	
						SASARAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
4	Kurangnya sinergitas antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan beragama	Tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Tim FKUB yang difasilitasi	270 Orang / Kali	Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Tim FKUB yang difasilitasi	81	81	81	27	270	Terkait langsung dengan masyarakat	398,700,000	Bakesbangpol	Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
5	Banyaknya ormas dan LSM yang belum terdata	Ormas dan LSM	Jumlah Ormas dan LSM yang terdata	10 Ormas/LSM	Tersedianya data dan informasi ormas di situbondo	Ormas dan LSM	Jumlah Ormas dan LSM yang terdata		5	5		10	Terkait langsung dengan masyarakat	86,000,000	Bakesbangpol	Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
					Meningkatnya kualitas infrastruktur pariwisata	ODTW	Jumlah ODTW yang sarana prasarana pariwisata yang ditingkatkan		1	1	2	4	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	2,677,545,000	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
					Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1	1	Tidak Terkait langsung dengan masyarakat	50,000,000	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
6	calon tenaga kerja belum yang memiliki kompetensi	calon tenaga kerja	Jumlah peserta pelatihan kerja yang berbasis kompetensi	230	Terciptanya tenaga kerja yang memiliki kompetensi	calon tenaga kerja	Jumlah peserta pelatihan kerja yang berbasis kompetensi	72	56	36	66	230	Terkait langsung dengan masyarakat	1,395,000,000	Dinas Ketenagakerjaan	Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Transmigrasi
					Terlaksananya Pelatihan SDM Industri Kecil Dan	IKM	Jumlah SDM yang dibina		170	170	175	515	Terkait langsung dengan masyarakat	6,195,451,701	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan

No	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/STAKEHOLDER UTAMA)	Jumlah Anggaran	Unit Pelaksana/ Satuan Kerja Pelaksana		
						SASARAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
					Menengah												
					Terlaksananya peningkatan kemitraan usaha mikro dengan e-commerce	UMKM	Jumlah UMKM yang Bermitra				15	15	Terkait langsung dengan masyarakat		Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	
					Terbangun, Tereabilitasi dan Terpeliharaanya Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	Jumlah Unit Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		23		23		Terkait langsung dengan masyarakat	2,205,410,511	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					Terbangun, Tereabilitasi dan Terpeliharaanya Jalan Usaha Tani	Unit	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			7		7	Terkait langsung dengan masyarakat	1,159,600,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					Tersedianya alokasi anggaran desa untuk pembangunan Jaringan Komunikasi Data	Titik	Jumlah titik koneksi jaringan komunikasi data	34	34	34	34	136	Terkait langsung dengan masyarakat		DPMD	Diskominfo	
7	Meningkatnya kecelakaan lalu lintas	perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	1132 unit	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	283	283	283	283	1132	Terkait langsung dengan masyarakat	21,112,011,157	Dinas Perhubungan	Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan	
					Tersedianya regulasi, insentif, dan	Dokumen	Jumlah Regulasi yang					0	Terkait langsung dengan masyarakat		DPMPTSP Kab. Situbondo	DPMPTSP Kab. Situbondo	

No	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/STAKEHOLDER UTAMA)	Jumlah Anggaran	Unit Pelaksana/ Satuan Kerja Pelaksana		
						SASARAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
					promosi penanaman modal		disusun										
					Terbentuknya tim percepatan investasi	dokumen	jumlah dokumen sk yang disusun	1				1	Tidak terkait langsung dengan masyarakat	-	DPMPTSP Kab. Situbondo	DPMPTSP Kab. Situbondo	
					Terlaksananya penggunaan layanan digital untuk pelayanan perizinan dan non perizinan	1 aplikasi	jumlah aplikasi pelayanan tersedia				1	1	Tidak terkait langsung dengan masyarakat	76,088,000	DPMPTSP Kab. Situbondo	DPMPTSP Kab. Situbondo	
					Tersedianya peta potensi investasi	1 Dokumen	jumlah dokumen peta potensi		1			1	Terkait langsung dengan masyarakat	60,000,000	DPMPTSP Kab. Situbondo	pihak ketiga	
					Tersedianya mal pelayanan publik (MPP)	29 layanan	jumlah unit layanan				29	29	Terkait langsung dengan masyarakat		DPMPTSP Kab. Situbondo	stakeholder	
8	Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha & Masyarakat	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup yang dijadikan dasar penyusunan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Terfasilitasinya pemenuhan ketentuan dan kewajiban persetujuan Lingkungan /izin PPLH	1 Dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup Kab. Situbondo yang disusun	33 %	33 %	34 %		100%	Terkait langsung dengan masyarakat dan Stakeholder	10,554,500	DLH Kab. Situbondo	DLH Kab. Situbondo	
9	Banyaknya Pengaduan Masyarakat terhadap Pencemaran Lingkungan	Pelaku Usaha & Masyarakat	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang dapat Terselesaikan	100%	Pengawasan Lingkungan kepada pelaku usaha	100%	Tindak Lanjut atas pengaduan masyarakat terkait permasalahan	25 %	25 %	25 %	25%	100%	Terkait langsung dengan masyarakat	54,344,200	DLH Kab. Situbondo	DLH Kab. Situbondo	

No	PERMASALA HAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/STAKEHO LDER UTAMA)	Jumlah Anggaran	Unit Pelaksana/ Satuan Kerja Pelaksana	
						SASARAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
						an lingkungan hidup	75 Pelaku Usaha	Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang telah mempunyai izin lingkungan dalam pelaksanaan dokumen lingkungan yang dimiliki							DLH Kab. Situbondo	DLH Kab. Situbondo
					Fasilitasi Legalitas Industri Kecil Dan Menengah	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi Legalitas Industri Kecil Dan Menengah				25	25	Terkait langsung dengan masyarakat	-	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
					Terlaksanaanya Update Informasi Industri Secara Berkala	Dokumen	Jumlah Dokumen Informasi Industri Melalui SIINas				1	1	Terkait langsung dengan masyarakat	-	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan
					Terlaksanaanya pembinaan pada pelaku usaha	150 Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan		15	0		150	Terkait langsung dengan masyarakat	118,957,280	DPMPTSP Kab. Situbondo	DPMPTSP Kab. Situbondo
					Terlaksanaanya pengawasan kegiatan usaha	30 Kegiatan Usaha	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi		15	15		30	Terkait langsung dengan masyarakat	83,745,440	DPMPTSP Kab. Situbondo	tim pengawasan berusaha
					Terlaksanaanya kegiatan pemantauan	Kegiatan Usaha	Jumlah kegiatan pemantauan					0	Terkait langsung dengan masyarakat		DPMPTSP Kab. Situbondo	tim pengawasan berusaha

No	PERMASALA HAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/STAKEHO LDER UTAMA)	Jumlah Anggaran	Unit Pelaksana/ Satuan Kerja Pelaksana		
						SASARAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
						n pelaku usaha											
					Intensitaf Pemantauan dan pengawasan lokasi pelanggar	25 Kegiatan	Jumlah pelaku usaha yang tak berjin	6	6	7	8	27	Terkait langsung dengan masyarakat	38,541,700	Satpol PP Kab. Situbondo	Satpol PP Kab. Situbondo	
					Tersedianya sarana dan prasaranan pelayanan kesehatan hewan dan peningkatan produksi ternak	1 Layanan	Jumlah layanan kesehatan hewan dan peningkatan produksi ternak	0.2 5	0.2 5	0.2 5	0.2 5	1	Terkait langsung dengan masyarakat	39,020,000	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Situbondo	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Situbondo	
					Terlaksanaan ya koordinasi dan pengawasan perizinan pelayanan kesehatan hewan	1 Layanan	Jumlah kegiatan koordinasi dan pengawasan perizinan pelayanan kesehatan hewan	0.2 5	0.2 5	0.2 5	0.2 5	1	Terkait langsung dengan masyarakat		Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Situbondo	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Situbondo	
					Terlaksanaan ya pengawasan dan peningkatan kompetensi petugas paramedik veteriner dan medik veteriner	1 Layanan	Jumlah kegiatan pengawasan dan peningkatan kompetensi petugas paramedik veteriner dan medik veteriner	0.2 5	0.2 5	0.2 5	0.2 5	1	Terkait langsung dengan masyarakat		Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Situbondo	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Situbondo	
					Terlaksanaan ya pengawasan perizinan paramedik veteriner	1 Layanan	jumlah kegiatan pengawasan perizinan paramedik veteriner	0.2 5	0.2 5	0.2 5	0.2 5	1	Terkait langsung dengan masyarakat		Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Situbondo	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Situbondo	

No	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/STAKEHOLDER UTAMA)	Jumlah Anggaran	Unit Pelaksana/ Satuan Kerja Pelaksana		
						SASARAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	
					dan medik veteriner	dan medik veteriner											
					Melaksanakan verifikasi awal permohonan perizinan paramedik veteriner dan medik veteriner	1 Layanan	Jumlah kegiatan verifikasi awal permohonan perizinan paramedik veteriner dan medik veteriner	0.25	0.25	0.25	0.25	1	Terkait langsung dengan masyarakat		Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Situbondo	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Situbondo	
					Terlaksananya koordinasi dan pengawasan perizinan pertanian yang terlaksana	1 Dokumen	Jumlah koordinasi dan pengawasan perizinan pertanian yang terlaksana	1	1	1	1	4	Terkait langsung dengan masyarakat	10,000,000	Dispertangan		
					Terlaksananya event kontes ternak	1 Layanan	Jumlah event kontes ternak		1			1	Terkait langsung dengan masyarakat	500,000,000	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Situbondo	Dinas dan pihak ketiga	
					Tersusunnya media promosi pariwisata daerah secara offline dan online	ODTW	Jumlah Objek Daya Tarik Wisatawan (ODTW) Yang dipromosikan skala Nasional dan Internasional	7	7	7	7	28	Tidak terkait langsung dengan masyarakat (stakeholder utama)	850,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	
					Terlaksananya event promosi yang diikuti	2 Dokumen	Jumlah event promosi yang diikuti			2		2	Terkait langsung dengan masyarakat	131,700,000	DPMPTSP Kab. Situbondo	pihak ketiga	

No	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/STAKEHOLDER UTAMA)	Jumlah Anggaran	Unit Pelaksana/ Satuan Kerja Pelaksana	
						SASARAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
					Terlaksanaanya Promosi melalui media cetak dan elektronik	1 Dokumen	Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana			1		1	Terkait langsung dengan masyarakat	33,300,000	DPMPTSP Kab. Situbondo	tim promosi
					Terlaksanaanya Temu Usaha Kemitraan	1 Dokumen	Jumlah Temu Usaha Kemitraan yang terlaksana		1		1	2	Terkait langsung dengan masyarakat	50,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Terlaksanaanya even petik kopi	1 Dokumen	Jumlah even petik kopi yang terlaksana		1			1	Terkait langsung dengan masyarakat	100,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.47%	Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap				74.47	74.47	Terkait langsung dengan masyarakat	115,342,423,290	DPUPP	Bidang Bina Marga
					Terlaksanaanya Pembangunan Jalan dan Jembatan	-	Panjang Jalan yang Dibangun					0	Terkait langsung dengan masyarakat	0	DPUPP	Bidang Bina Marga
					Terlaksanaanya Rekonstruksi Jalan dan Jembatan	4 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		1	1	2	4	Terkait langsung dengan masyarakat	71,567,423,290	DPUPP	Bidang Bina Marga
					Terlaksanaanya Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	5 KM	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		2	2	1	5	Terkait langsung dengan masyarakat	18,805,000,000	DPUPP	Bidang Bina Marga
					Terpeliharaanya Jalan dan Jembatan Secara Rutin	0,5 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin		0.1	0.2	0.2	0.5	Terkait langsung dengan masyarakat	11,320,000,000	DPUPP	Bidang Bina Marga

Tabel 4.4 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting

Target	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	T W I	T W II	T W III	T W IV	Total		
24 %	Sarana dan Prasarana Penanganan Stunting	PENINGKATAN PENANGGALAN STUNTING SECARA CEPAT DAN TEPAT SASARAN	Jumlah sarana dan prasarana pendukung penurunan angka stunting	3 jenis sarana dan prasarana pendukung (SDM, Perangkat dan Aplikasi)																			
	Meningkatnya Fokus kebijakan penanganan stunting	Persentase regulasi yang mengatur penurunan angka stunting	100%	Penyusunan SOP di semua jenjang	Dokumen	Jumlah SOP pelaksanaan kegiatan	4	3	6	4	17	1.	Penyusunan SOP	0	BAPPEDA, DINKES, DP3AP2 KB, DISKOMINFO								
				Pelaksanaan FGD Penanganan Stunting	Kegiatan	Jumlah FGD			1	1	2	1.	Pelaksanaan FGD		DP3AP2 KB	BAPPEDA, DINKES							
				Pelaksanaan Mini Lokakarya Lintas Sektor Kecamatan	Dokumen	Jumlah Laporan Mini Lokakarya Lintas Sektor Kecamatan	2	1	1	2	6	1.	Pelaksanaan Lokakarya	224.400.000,-	DP3AP2 KB	BAPPEDA, DINKES							
				Pelaksanaan Audit Stunting	Dokumen	Jumlah Laporan Audit Stunting			1	1	2	1.	Pelaksanaan Audit Stunting	19.800.000,-	DP3AP2 KB	BAPPEDA, DINKES							

Target	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran		
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	T W I	T W II	T W III	T W IV	Total				
	Meningkatnya Publikasi Penanganan Stunting	Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui media resmi pemda	2 jenis informasi (Intervensi spesifik dan Intervensi sensitif)	Penyediaan informasi Audio dan Visual	Informatif	Jumlah informasi audio dan visual		5	8	12	20	45	1. Penyediaan informasi		DISKOMINFO	DP3AP2KB, DINKES, BAPPEDA									
				Penyediaan Informasi Pembuatan Kartu Kembang Anak (KKA)	Informatif	Jumlah Informasi pembuatan Kartu Kembang Anak (KKA)		21	48			21	48	1. Penyediaan informasi	27.419.220,-	DP3AP2KB	DISKOMINFO								
				Pelaksanaan Edukasi Hidup Sehat	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan edukasi hidup sehat			1	1	1	3		1. Pelaksanaan sosialisasi 2. Pelaksanaan publikasi 3. Pelatihan	246.240.000,-	DP3AP2KB	DP3AP2KB, DINKES								
				Pemberian Informasi Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Informatif	Jumlah Informasi Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK)				1	1	2		1. Pelaksanaan sosialisasi 2. Pelaksanaan publikasi		DP3AP2KB	DINKES								

Target	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran	
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	T W I	T W II	T W III	T W IV	Total			
					Pelaksanaan Edukasi Kemandirian Keluarga	Kegiatan	Jumlah kegiatan edukasi kemandirian keluarga			1	1	2	1.	Pelaksanaan sosialisasi 2. Pelaksanaan publikasi		DP3AP2 KB	DISKOMI NFO, DINKES							
					Pelaksanaan orientasi dan sosialisasi pada Tim Pendamping Keluarga	Kegiatan	Jumlah kegiatan orientasi dan sosialisasi Tim Pendamping Keluarga	396	397	397	397	1587	1.	Pelaksanaan sosialisasi 2. Pelaksanaan publikasi	3,356,404,000	DP3AP2 KB	DISKOMI NFO, DINKES							
					Pelaksanaan Publikasi intervensi spesifik	Kegiatan	Jumlah publikasi intervensi spesifik	1	1	1	2	5	1.	Pelaksanaan sosialisasi 2. Pelaksanaan publikasi		DP3AP2 KB, DINKES	DISKOMI NFO							

Target	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	T W I	T W II	T W III	T W IV	Total		
					Pelaksanaan sosialisasi penggunaan metode kontrasepsi untuk pencegahan 4T	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi penggunaan metode kontrasepsi untuk pencegahan 4T				1	1	1.	Pelaksanaan sosialisasi		DP3AP2 KB	DISKOMI NFO, DINKES						
					Pelaksanaan Publikasi intervensi sensitif	Kegiatan	Jumlah publikasi intervensi sensitif	1	1	1	2	5	1.	Pelaksanaan sosialisasi		DP3AP2 KB, DINKES	DISKOMI NFO						
					Pelaksanaan orientasi kelas pengasuhan pada kader BKB (Sekolah Orang Tua Hebat)	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan orientasi kelas pengasuhan pada kader BKB (Sekolah Orang Tua Hebat)	0	68	68	0	136	1.	Pelaksanaan sosialisasi	35,925,900	DP3AP2 KB							

Tabel 4. 5 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri

No	Permasalahan (Bottleneck)	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT/ STAKEHOLDER UTAMA)	Jumlah Anggaran	Unit Pelaksana/ Satuan Kerja Pelaksana	
						SASARAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana
1	Rendahnya capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Instansi Pemerintah - Ik: Realisasi transaksi P3DN	Terwujudnya sistem tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik - Ik: ITKP	Meningkatnya Pengelola PBJ yang Kompeten - IK: Jumlah SDM pengelola PBJ yang tersertifikasi	50%	Terlaksanaanya pelatihan kepada SDM UKPBJ	17 Orang SDM PBJ	Jumlah Kegiatan sertifikasi kepada SDM UKPBJ yang sudah diberikan pelatihan	√	√	√	√		Tidak Terkait	Rp 85,000,000	BKPSDM	BKPSDM & UKPBJ
					Terlaksanaanya sertifikasi kepada SDM UKPBJ yang sudah diberikan pelatihan	17 Orang SDM PBJ	Jumlah pelatihan kepada SDM UKPBJ	√	√	√	√		Tidak Terkait		BKPSDM	BKPSDM & UKPBJ

					Terlaksana nya Monitorin g dan Evaluasi Terhadap Lulusan Sertifikasi	17 Orang SDM PBJ	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Lulusan Sertifikasi		√		√		Tidak Terkait		BKPSDM	BKPSDM & UKPBJ
			Meningkatnya Kematangan UKPBJ - IK: Tingkat kematangan UKPBJ	90%	Terlaksana nya peningkata n pada Domain Proses	1 Kegiatan	Jumlah peningkatan pada Domain Proses			√	√		Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD
					Terlaksana nya peningkata n pada Domain Kelembaga aan	1 Kegiatan	Jumlah peningkatan pada Domain Kelembaga an	√					Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD
					Terlaksana nya peningkata n pada Domain SDM	1 Kegiatan	Jumlah peningkatan pada Domain SDM	√					Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD
					Terlaksana nya peningkata n pada Domain Sistem Informasi	1 Kegiatan	Jumlah peningkatan pada Domain Sistem Informasi	√					Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD
					Terlaksana nya Monitorin g dan Evaluasi terhadap seluruh Domain	1 Kegiatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh Domain	√					Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD

		Meningkatnya Optimalisasi sistem teknologi informasi dalam menunjang proses pengadaan barang dan jasa - IK: Tingkat kepatuhan pelaporan melalui sistem	80%	Terlaksana nyanyanya peningkatan pada SIRUP	2 Kegiatan	Jumlah peningkatan pada SIRUP	√			√	Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD
				Terlaksana nyanyanya peningkatan pada e-Tendering	2 Kegiatan	Jumlah peningkatan pada e-Tendering	√			√	Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD
				Terlaksana nyanyanya peningkatan pada e-Purchasing	2 Kegiatan	Jumlah peningkatan pada e-Purchasing	√			√	Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD
				Terlaksana nyanyanya peningkatan pada Non e-Tendering dan Non e-Purchasing	2 Kegiatan	Jumlah peningkatan pada Non e-Tendering dan Non e-Purchasing	√			√	Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD
				Terlaksana nyanyanya peningkatan pada e-Kontrak	2 Kegiatan	Jumlah peningkatan pada e-Kontrak	√			√	Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD

		Meningkatnya jumlah pelaku usaha pdn/umkm dalam proses pengadaan - Ik: Presentase peningkatan pelaku usaha yang terdaftar di katalog lokal	Terwujudnya iklim perijinan pelaku usaha lokal yang mudah dan ramah pelaku usaha - IK: 1. Presentase ketepatan pembayaran termin 2. Sertifikasi TKDN bagi UMKM sesuai SLA xx hari 3. Jumlah regulasi yang mendukung P3DN	30%	Terlaksana nya pembayaran termin pelaku usaha sesuai SLA xx hari	1 Kegiatan	Jumlah pembayaran termi pelaku usaha sesuai SLA xx hari	√	√	√	√	Terkait	UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD
					Terlaksana nya proses sertifikasi TKDN bagi UMKM lokal sesuai SLA xx hari	1 Kegiatan	Jumlah Sertifikasi TKDN bagi UMKM lokal sesuai SLA xx hari			√	√	Terkait	DISKOPERI NDAG	DISKOPERI NDAG & UKPBJ
					Terlaksana nya penerbitan regulasi daerah yang mendukung P3DN dan UMKM	1 Kegiatan	Jumlah penerbitan regulasi daerah yang mendukung P3DN dan UMKM	√				Tidak Terkait	UKPBJ	UKPBJ dan Seluruh OPD

					Terlaksana anya MOU dengan perusaha an swasta maupun BUMN untuk kerjasam a pelatihan para pelaku usaha UMKM	1 Kegiatan	Jumlah MOU dengan perusahaan swasta maupun BUMN untuk kerjasama pelatihan para pelaku usaha UMKM							✓		Terkait		DISKOPERI NDAG	DISKOPERI NDAG
					Terlaksana anya Monitoring dan Evaluasi harga dan aktivitas penyedia di ekatalog	1 Kegiatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi harga dan aktivitas penyedia di ekatalog							✓		Tidak Terkait		UKPBJ	UKPBJ

Tabel 4. 6 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi

NO	SASARAN STRATEGIS	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI (TERKAIT ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT /STAKEHOLDER UTAMA)	JUMLAH ANGGARAN	UNIT/SATUAN KERJA	
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL			KOORDINATOR	PELAKSANA
1	INFLASI	Melambungnya harga bahan pokok	Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan pengawasan harga kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan hasil monitoring dan pengawasan harga kebutuhan pokok	Tersedianya informasi harga kebutuhan pokok	Operasi pasar dan pasar murah	Penyelenggaraan Operasi Pasar dan pasar murah yang dilaksanakan	Jumlah Operasi Pasar dan pasar murah yang dilaksanakan	ops	ops	ops		35 titik	langsung dengan Masyarakat		Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Situbondo
				Laporan hasil pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	Tersedianya informasi penyaluran pupuk bersubsidi	monitoring dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	penyelenggaraan pengawasan dan monitoring distribusi pupuk bersubsidi yang diawasi	Jumlah distribusi pupuk bersubsidi yang diawasi	Mon ev	Mon ev	Mon ev	Mon ev	17 Kecamatan	langsung dengan Masyarakat		Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Situbondo
															347,654,000		

2			Meningkatkan keterjangkauan pasokan	Laporan Produksi Peternakan dan Perikanan	1	pengendalian dan penanggulangan penyakit	7 Puskeswan	Jumlah Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	2	2	2	7	langsung dengan Masyarakat	752,875,000	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Situbondo
						tersedianya pakan yg berkualitas dan penerapan teknologi peternakan dan perikanan	1 Layanan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/ Pakan yang Beredar	0	0	0	1	1	langsung dengan Masyarakat	200,000,000	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Situbondo
						terlaksananya pendampingan unit usaha peternakan dan perikanan serta produk hasil peternakan dan perikanan	1 Laporan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	0	0	0	1	1	langsung dengan Masyarakat	100,000,000	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Situbondo

3			Meningkatkan keterjangkauan pasokan	Meningkatkan Produksi pertanian	Tersediaanya produksi pertanian	Pemanfaatan lahan pekarangan	Kelompok tani	Jumlah Kelompok tani dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan lahan pekarangan			2	2	Tidak terkait	393,718,800	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	Jumlah Unit Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		23		23	Terkait	2,205,410,511	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Unit	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		7		7	Terkait	1,159,600,000	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

					Terlaksana nya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sumur Dalam / Dangkal	Unit	Sumur Dalam / Dangka l yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		10		10	Terkait	3,850,425,960	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					Tersedianya Bibit Padi Varietas Unggul Baru	Ton	Bibit Padi Varieta s Unggul Baru yang Tersedia		10	20	20	50	Terkait	1,775,823,820	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Tersedianya Fasilitasi Bibit Hortikultura dan Perkebunan	Batang	Fasilitasi Bibit Hortiku ltura dan Perkebunan yang Tersedia				225 00	22500	Terkait	2,000,000,000	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Tersedianya Alsintan Pertanian	Unit	Alsinta n Pertani an yang Tersedia		44			44	Terkait	1,272,722,700	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Tersedianya Pupuk Non Subsidi Gratis	Ton	Pupuk Non Subsidi Gratis yang tersedia				527	527	Terkait	8,285,081,000	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

					Terlaksana nya Temu Usaha Kemitraan	Kali	Temu Usaha Kemitra an yang terlaksa na		1		1	2	Tidak terkait	50,000,000	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Terlaksana nya Pengembangan Pertanian Organik	Hektar	Pengem bangan Pertani an Organik yang Terlaks ana				5	5	Terkait	148,731,745	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Terlaksana nya Pengembangan Padi IP400	Hektar	Pengem bangan Padi IP400 yang Terlaks ana	1	1	1	1	4	Terkait	175,000,000	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Tersediany a Pupuk Organik Cair	Liter	Pupuk Organik Cair yang Tersedi a		511 80		51180		Terkait	5,000,000,00 0	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Terlaksana nya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Kelompok	Pelatiha n Pembuat an Pupuk Organik yang terlaksa na		17			17	Terkait	50,000,000	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

					Terselenggaranya Sekolah Lapang Budidaya Jagung, Cabai Rawit dan Vanili	Kelompok	Sekolah Lapang Budidaya Jagung, Cabai Rawit dan Vanili yang terlaksana		5		5	Terkait	200,000,000	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Terlaksananya Sekolah Lapang Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau	Kelompok	Sekolah Lapang Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau yang terlaksana		10		10	Terkait	250,000,000	Bagian Ekbang dan SDA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

C. Pengelola Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan.

Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh pemerintah daerah. Pada implementasinya setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di Pemerintah Daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (Strategic Transformation Unit (STU)). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di pemerintah daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi ini adalah:

1. merumuskan Road Map pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. melaksanakan Road Map RB dan program-program prioritas di setiap pemerintah daerah serta unit kerja;
3. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya; dan
5. melakukan penyesuaian-penesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

**Tabel 4.2 Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	a. Bupati Situbondo b. Wakil Bupati Situbondo
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
3	Wakil Ketua I	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
4	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
5	Wakil Ketua III	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo
6	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7	Anggota	
	a. Koordinator Reformasi General <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Zona Integritas, Penguatan Implementasi SPIP dan Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi - Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Penataan Jabatan Fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN dan Penguatan Sistem Merit - Pelaksanaan Arsitektur SPBE, Pelaksanaan Data Statistik Sektoral dan Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat - Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital - Pelaksanaan Arsip Digital - Pelaksanaan SAKIP, Pelayanan Publik Prima, Pelaksanaan Core Value ASN, Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyusunan Sistem Kerja - Pelaksana Tata Kelola Kebijakan Publik dan Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 	Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo

	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Barang dan Jasa Pemerintah 	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
	<ul style="list-style-type: none"> b. Koordinator Reformasi Tematik <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Tematik Pengentasan Kemiskinan - Pelaksanaan Tematik Peningkatan Investasi - Pelaksanaan Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan - Pelaksanaan Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri - Pelaksanaan Tematik Pengendalian Inflasi 	<p>Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo</p> <p>Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo</p> <p>Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo</p>
	c. Monitoring dan Evaluasi Internal	Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo
	d. Anggota Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja se Kabupaten Situbondo; b. Unsur dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Kabupaten Situbondo terkait.

D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB baik *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil). Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat.

2. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara triwulanan dan evaluasi dilakukan secara tahunan melalui pelaporan hasil evaluasi oleh Inspektorat Daerah.

BAB V PENUTUP

Reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa reformasi birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman reformasi birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi reformasi birokrasi yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis reformasi birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan reformasi birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator reformasi birokrasi. Adapun aspek penajaman reformasi birokrasi tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh perangkat daerah di Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI